

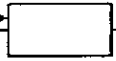
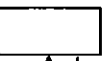
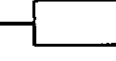
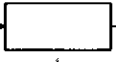
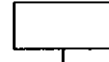
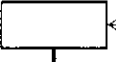
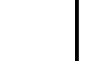
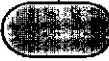




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 PLT. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN Deri Dariawan, ST, M.MT Pembina Tingkat. I, IV/b NIP. 19780311 200112 1 002
Nama SOP	Fasilitas Sengketa Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah6 Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten7 Pergub Nomer 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah. BD Provinsi Banten 2022 (48)8 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik9 Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyeselsaian Sengketa Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten2 Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan :<ol style="list-style-type: none">a) Melakukan pelayanan publikb) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasic) Memahami teknologi informasid) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Naskah Dinas Masuk2 SOP Naskah Dinas Keluar	<ol style="list-style-type: none">1 Desk/ Meja layanan informasi2 Komputer / Laptop3 Printer4 Dokumen Informasi Publik
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila tidak dilaksanakan SOP Fasilitas Sengketa Informasi Publik akan menimbulkan keberatan informasi publik melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan dokumen kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Atasan PPID Pelaksana	PPID Pembantu	PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Undangan/ tugas/ fasilitasi sengketa informasi publik Informasi					Surat Undangan/ tugas/ fasilitasi Sengketa Informasi Publik	Paling Lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Surat Undangan/ tugas/ fasilitas Sengketa informasi publik untuk dikordinasikan	
2	Koordinasi Permohonan Penyelesaian Sengketa					Surat Undangan Upaya Penyelesaian Sengketa		Persiapan Bahan Sengketa Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumpulkan Bahan Sengketa Pelayanan Informasi Publik					Persiapan Bahan Sengketa Pelayanan Informasi Publik		Formulir/ surat permohonan, bukti tanda terima formulir, surat jawaban, bukti tanda penyerahan jawaban, formulir/ surat keberatan, bukti tanda terima formulir keberatan, surat jawaban keberatan, bukti tanda penyerahan jawaban keberatan, dok. Pendukung lainnya	
4	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi					Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa, Bahan Sengketa Pelayanan Informasi Publik		Kesepakatan Mediasi	
5	Penyelesaian Sengketa					Kesepakatan Mediasi		Paling Lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja	Putusan Komisi Informasi